

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Surjarweni, 2015). Pemerintah adalah entitas pelapor yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014).

Di Indonesia salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di susun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah di tetapkan (Susilawati & Riani, 2014). Laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015). Oleh karena itu, informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yakni: i) relevan, ii) andal, iii) dapat dibandingkan, iv) dapat dipahami.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Erlina dan Rasdianto, 2013). LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Menurut Mulyadi (2002) laporan keuangan yang berkualitas dapat ditinjau dari aspek opini audit, audit pemerintahan daerah diamanatkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit menurut Mulyadi (2002) diantaranya adalah: i) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ii) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan, iii) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), iv) Pendapat Tidak Wajar dan v) Pernyataan tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 17 tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Kualitas salah satu unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun dinyatakan bahwa terdapat 535 LKPD yang dipriksa, BPK hanya memebrikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 406 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 11 entitas, opini Tidak Wajar (TW) ATAS 0 entitas, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 18 entitas pada tahun 2017 ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan pada kualitas laporan keuangan daerah pada tahun 2017, ini menjadi tahun ke 7 sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas telah mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa tujuan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti pemahaman standar akuntansi, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi ([www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id)).

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010). Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan memiliki hasil positif atau pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan Sari dkk pada tahun 2014, Novi dan Sanjaya pada tahun 2017.

Selain pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010, maka diperlukan adanya sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern merupakan salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan Artana (2016), Novi (2017) dan Sanjaya (2017) menunjukkan jika efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, I Made Pradana Adipura dan Edy Sujana (2014)). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Riana (2014) dan Sunjana (2014).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Sari dkk (2014), tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, perbedaan ini dengan penelitian yang dilakukan Sari dkk (2014) adalah dengan menambahkan variabel independen yaitu sistem pengendalian intern karena pada penelitian yang terdahulu dari variabel sistem pengendalian intern masih belum konsisten dan adanya saran

dari penelitian Sari dkk (2014) untuk penelitian selanjutnya agar memasukan variabel pengendalian intern. Begitu pula dengan penelitian Sunjana (2014) tentang Pemahaman SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, perbedaannya adalah menambahkan variable independen yaitu sistem pengendalian intern.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Diani (2014) melakukan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Parimana dengan hasil sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, apakah akan mempunyai hasil apa yang sama apabila dilakukan di Kabupaten Banyumas. Penelitian Novi (2017) tentang Pemahaman SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern, hasilnya berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya akan dilakukan penelitian di Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah lebih luas dari Kota Tebing Tinggi.

Disisi lain adanya rasa ingin tahu dari peneliti mengenai hasil opini audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah. Apakah hasil tersebut dipengaruhi oleh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pengendalian internal dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) oleh Aparatur Pemda Kabupaten Banyumas. Sebab itulah penulis tertarik

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh positif pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Membuktikan secara empiris pengaruh positif efektivitas sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Membuktikan secara empiris pengaruh positif pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah atau Instansi yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan menerbitkan informasi dan pertimbangan untuk membantu kinerja dan keputusan daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa tetap maksimal

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan pembaca dalam bidang akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan juga dapat dijadikan sebagai materi tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi yang berminat untuk melakukan penelitian dalam bidang ini.